



ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi dengan judul **Kewajiban Perusahaan Menyampaikan Informasi Lowongan Kerja Kepada Dinas Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.**

Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu tentang kewajiban perusahaan menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan faktor yang menjadi hambatan perusahaan tidak menyampaikan informasi lowongan kerja kepada dinas tenaga kerja berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap wajib menyampaikan informasi lowongan kerja oleh perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja karena perusahaan yang beroperasi di kabupaten rokan hilir masih banyak yang tidak menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja. khususnya di Kecamatan Bangko padahal dinas tenaga kerja Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Kecamatan Bangko. Tujuan penelitian ini agar mengetahui jawaban dari rumusan masalah dan untuk menyelesaikan tugas akhir penulis di Fakultas Syariah dan u Hukum pada program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini awalnya dilakukan observasi lapangan dan dilanjutkan dengan wawancara kepada responden.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa kewajiban perusahaan menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak terlaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini dilihat di lapangan dan berdasarkan data yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian. Peraturan tersebut tidak terlaksana dikarenakan perusahaan tidak mengetahui aturan tersebut, kebutuhan akan tenaga kerja yang mendesak, kurangnya sosialisasi dari dinas tenaga kerja, tidak adanya pengawasan serta penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut belum pernah terlaksana. Disarankan kepada perusahaan untuk mematuhi aturan tersebut, kepada pihak dinas tenaga kerja melakukan sosialisasi kembali serta dinas tenaga bertindak tegas menerapkan sanksi.